

# Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Sulawesi Utara

Mery Krismas Siagain  
M. S. Pangkey  
J. J. Rares

**Abstract:** Finance and Development Supervisory Agency is a non – departmental institution formed only by Presidential decree. Where many people judge needs to be done over the dissolution of the Finance and Development Supervisory Agency, the reason is because it is necessary for both power and efficiency of public spending because it has too many institutions existing internal control. This research is done on the employees of Finance and Development Supervisory Agency in North Sulawesi. The purpose of this study was to determine the performance of the Finance and Development Supervisory Board role in serving the community. The analytical method used is descriptive method in the form of field that is required in this study is derived from the result of interviews, field notes and photos - photos as a field. Then the fields obtained by researchers, it will be the field using an interpretive approach, where researchers interpret the meaning of the field that has been collected by giving attention and record as many aspects studied at the time.

**Keywords :** Performance: Finance and Development Supervisory Agency

## PENDAHULUAN

BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) merupakan lembaga non departemen yang dibentuk hanya berdasarkan keppres dimana. Banyak orang menilai perlu dilakukan pembubaran atas BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), alasannya dikarenakan hal tersebut perlu dilakukan untuk efisiensi baik tenaga maupun pengeluaran negara karena sudah terlalu banyak lembaga pengawasan internal yang telah ada

Sebetulnya wacana ini telah lahir di mulai sejak awal tahun 2000-an, yakni ketika era reformasi telah menggantikan orde baru, dimana pada saat itu terjadi reformasi besar-besaran di struktur pemerintahan. Demikian juga halnya di bidang keuangan. Seolah - olah masyarakat telah menjadi antipati terhadap hal-hal yang mengandung produk orde baru, tidak dapat dihindari, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) pun dijadikan sasaran. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) merupakan salah satu lembaga yang “super power” ketika masa orde baru.

BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) memiliki tiga strategi yaitu : *presumptif, preventif, dan represif*.

*Presumptif* adalah strategi untuk meningkatkan kesadaran bahwa tidak hanya kalangan pemerintahan tetapi juga masyarakat untuk memberantas korupsi. Cara-cara yang dilakukan adalah dengan sosialisasi mengenai bahaya korupsi dan dampak yang akan terjadi. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara menekankan mengenai dampak korupsi pada tiap pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan. Sehingga dari awal, masyarakat telah sadar bahwa korupsi merupakan musuh utama dalam memajukan suatu badan atau bahkan negara.

*Preventif*, dari bahasa tersebut diambil dari bahasa inggris yang artinya adalah mencegah. Maka, strategi ini dilakukan untuk melakukan pencegahan dan pendeteksian secara dini terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di pemerintahan. Pemerintah telah mengembangkan sistem dan prosedur dalam rangka mendukung pencegahan kasus - kasus korupsi yang akan muncul.

*Represif*, yaitu tidak lagi mencegah tetapi menanggulangi dengan cara pemberantasan kasus korupsi yang ada. Pemberantasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) tetapi juga dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi). Dari peran dan strategi yang dimiliki BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), maka diharapkan dapat memberikan dampak yang besar bagi pemerintahan Indonesia terutama dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia.

Tapi meskipun demikian masih saja ada pelanggaran contohnya didalam melakukan pengelolaan administrasi keuangan salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih ada perencanaan yang dilakukan sembarangan misalnya dalam pengambilan gaji pencairan tidak sembarang dan asal-asal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata kata *job performance* atau *actual performance* yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Penilaian kerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu seperti efektifitas dan efisien tetap harus dilihat juga dari indikator – indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti kepuasan akuntabilitas dan responsivitas. Dwiyanto (1995:9) menggunakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

#### 1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi , tapi juga

efektifitas. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Pada tataran ini , konsep produktivitas dirasa terlalu sempit sehingga *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

#### 2. Kualitas Pelayanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negative mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi public, sebab akses untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan relatif sangat mudah dan murah.

#### 3. Responsivitas

Responsifitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena res[ponsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pealyanna dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas

menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi (Lenvine,1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat, sehingga dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti, pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai- nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Di satu sisi kajian ini berupaya mendeskripsikan suatu fenomena secara apa adanya dari prespektif pelakunya, sedang dari sisi pendeskripsian itu dilakukan dengan bantuan wawancara . Dengan demikian diharapkan agar Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan lebih teliti lagi dalam memeriksa keuangan.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam pendahuluan bahwa fokus penelitian ini adalah Kinerja Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dalam hal ini bagaimana Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan memenuhi 3 unsur pelayanan publik menurut lanvine yaiturensponsivines, resnsponsibiliti, dan akuntabiliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah (1) data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, dan (2) data sekunder, yaitu yang diperoleh dari dokumen Renstra yang mendukung hasil analisis penulis atas sistem nilai yang dianut dalam proses penyusunan rencana strategis di di Perwakilan BPKP Sulawesi Utara.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Survey Lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi Simanjuntak (2005) dan Sugiyono (2010:64)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Moleong (2005:186),

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Sugiyono (2010:82)

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut: (1) Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. (2) Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. (3) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai. (4) Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya.

Untuk memperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya. Kredibilitas berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan

cara: (1) Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. (2) Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Kredibilitas data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (3) Menggunakan bahan referensi, bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara ataupun foto-foto sehingga lebih dapat dipercaya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Produktivitas**

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisien, tetapi juga efektivitas. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Sedangkan menurut Staf Dosen BPA UGM Yogyakarta (2000:109) efektivitas adalah suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap perbuatan yang efisien, tentu saja juga berarti efektif, karena dilihat dari hasil, tujuan, atau akibat yang dikehendak dengan perbuatan itu telah dicapai.

Dilihat dari penjelasan dan rangkuman wawancara maka dalam poin

produktivitas ini peneliti mencoba mengkombinasikan antara definisi mengenai produktivitas di atas dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang dari BPKP yang tertuang dalam surat keputusan kepala BPKP KEP.06.00.00 – 286/K/2001 jo.KEP – 713/K/SU/2002,menuntut perwakilan Sulawesi Utara menjadi suatu institusi yang katalis yaitu suatu institusi yang mendorong pembaharuan bagi perbaikan manajemen pemerintah.

Mengingat pada masa kini tuntutan yang timbul dari masyarakat untuk memberdayakan pengawasan sedemikian besar,dengan demikian diharapkan dapat dikembangkan pengawasan yang lebih berorientasi pada kebutuhan / tuntutan masyarakat serta memberikan saran dan asistensi bagi perbaikan manajemen. Poin pertama yang dibahas adalah SDM para anggota sudah didaya gunakan secara optimal untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Manusia di BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah dioptimalkan,karena adanya program kerja tahunan( PKT) berisi apa yang dikerjakan selama setahun,perencanaan program sasaran kinerja individu terhadap kinerja dari para anggota,juga ada yang disebut Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT).

Poin kedua adalah anggota BPKP Provinsi Sulawesi Utara sangat mengetahui bidang masing – masing setiap anggota dan sesuai dengan kemampuan,karena di BPKP Provinsi Sulawesi Utara mengadakan latihan dan juga PPM (pengawasan program mandiri).BPKP juga memberikan diklat,pelatihan agar sesuai dengan kemampuan dan mengetahui pekerjaan di bidang anggota masing – masing.

Kedisiplinan pegawai dapat dilihat pada saat pegawai masuk kantor,dan menjadi bukti pegawai masuk tepat waktu adanya *single print* di kantor BPKP Sulawesi Utara.

## 2. Kualitas Pelayanan

Isu mengenai kualitas pelayanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan terhadap kualitas layanan yang diterima dari organoisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi public,sebab akses untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan sangat mudah dan murah.

Kualitas pelayanan adalah sarana untuk mencapai kepuasan dan ikatan. Tujuan keseluruhan bisnis bukanlah menghasilkan produk dan jasa yang bermutu,melainkan pelayanan yang prima.Oleh karena itu,memberikan mutu tinggi dan peayanan yg ptima adalah suatu keharusan apabila ingin mencapai layalitas konsumen.

Berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayana berhubungan dengan produk yang diciptakan oleh BPKP,apakah sesuai berpihak pada kesejahteraan masyarakat atau tidak.Berdasarkan hasil wawancara berbicara kualitas pelayanan BPKP Sulawesi utara sudah cukup baik.Karena semua program yang dilakukan berpihak pada masyarakat,hanya saja keberpihakan tidak langsung kepada masyarakatnya tetapi pada objek yang berpihak pada masyarakat contohnya saja PNPM. BPKP akan memastikan apakah program kegiatan yang dibuat berjalan sesuai perencanaan dan memastikan berhasil dengan cara mengaudit pihak- pihak yang bersangkutan untuk memastikan berjalan dan kena pada sasaran yang dituju.

## 3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengimbangkan program – program pelayanan public sesuai dengan

kebutuhan. Dalam konteks responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan. Responsivitas dimasukkan dalam salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi itu jelek. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.

Responsivitas adalah kemampuan dari BPKP menjawab kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan sinkronkan dengan kedua teori yang ada di atas dalam menjawab permintaan masyarakat, dalam hal ini BPKP sudah dikatakan menjawab kebutuhan masyarakat dan tuntutan masyarakat dengan baik. BPKP Provinsi Sulawesi Utara melibatkan pemerintah daerah, Instansi - Instansi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan adanya PDAM, BUMN untuk mencegah pemberantasan korupsi. Juga melakukan pelayanan sesuai standar pelayanan.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi (Lenvine, 1990) oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai indikator responsibilitas untuk kinerja BPKP Sesuai dengan perundang – undangan yang ada di mana administrasi program kegiatan BPKP sudah dikelola dengan baik.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas public menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsi adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat, sehingga dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas public dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kegiatan dan kebijakan organisasi publik konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi public tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai – nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

BPKP dalam hal ini merupakan pihak amanah yang harus bertanggung jawab pada Auditor tergantung pada Tupoksi bidang masing – masing sebagai pemberi amanah. Karena BPKP merupakan perwakilan BPKP yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi BPKP seharusnya aktif dalam hal melaporkan kinerja pertahun. Dan bila adanya pelanggaran dari anggota akan diberikan sanksi sesuai dengan besar kesalahan yang dilakukan anggota. Misalnya bila anggota datang terlambat dan pulang lebih awal dari yang ditentukan maka akan dipotong tunjangan kinerja sebanyak 2%. Kemudian bila ada pegawai yang tidak masuk dalam waktu dua hari dan tanpa pemberitahuan maka tunjangan kinerja akan dipotong sebanyak 10%. Bahkan ada pegawai BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang diberhentikan dari pekerjaannya.

BPKP sangat aktif memberikan laporan kepada pihak - pihak yang terkait dan transparansi selagi itu masih dibatas

tidak rahasia bagi BPKP Provinsi Sulawesi Utara. misalkan BPKP dibidang Investigasi akan memberikan laporan kepada kepala bidang Investigasi ,kepada penyidik dan kejaksaan selagi itu tidak rahasia bagi BPKP. Untuk pertanggungjawaban BPKP mempunyai surat kerja, bila diinvestigasi dalam penyelidikan dikatakan kertas kerja sebagai bukti dalam pengadilan bahwa BPKP mempunyai pertanggung jawaban.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Diukur dengan Indikator Produktifitas , Untuk BPKP Provinsi Sulawesi Utara menjalankan Tugas dan fungsi yang cukup baik, dengan memberikan anggota pelatihan, diklat, juga PPM. Sehingga anggota BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahu Kemampuan di bidang masing – masing.
2. Diukur dari indikator kualitas pelayanan untuk BPKP dikatakan cukup maksimal, ikut berperan dalam Kesejahteraan masyarakat, meski tidak langsung pada masyarakat tapi lebih focus pada objek.
3. Diukur dari Indikator Responsivitas BPKP termasuk Optimal dalam melakukan Tugas dan fungsi, hanya saja beberapa factor yang membuat BPKP menjadi sedikit kurang optimal. karena dari instansi atau yang bersangkutan BPKP Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado, karena adanya budaya malas.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas penerapan Kinerja Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah

dalam pelaksanaan kegiatan, kerja sama antara sesama anggota tim maupun antara anggota tim dan ketua tim masih perlu ditingkatkan, dalam hal ini kerja sama berupa bantuan, arahan, dan dukungan terhadap anggota tim yang masih terbilang baru yang masih membutuhkan arahan dan petunjuk dalam mengerjakan tugasnya sebagai anggota tim guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sehingga laporan hasil pelaksanaan kegiatan senantiasa selesai tepat pada waktunya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus. 1999. *"Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik"*. Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM, Yogyakarta
- Mangkunegara Prabu, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*; Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Lenvine Charles. 1990. *Public administration : Challenges, Choice, Consequences*.
- Maleong Lexy. 1986, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung
- Simanjuntak Payaman. 2005. *Manajemen Kinerja*.  
[http://www.nakertrans.go.id/majalah\\_buletininfo\\_hukumvol1\\_vi\\_2005/manajemen\\_kinerja.php](http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletininfo_hukumvol1_vi_2005/manajemen_kinerja.php)
- Staf BPA UGM, 2000. *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Langit. Jakarta
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & B*. Alfabeta. Bandung
- [WWW.SitusResmiBPKP.com](http://WWW.SitusResmiBPKP.com)
- Sumber Undang – undang  
PePres no 192 Tahun 2014  
Impres no 9 Tahun 2014  
PP no 53 tahun 2010  
PP no 60 Tahun 2000